

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kaderisasi merupakan unsur penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi karena berhubungan langsung dengan proses penyiapan generasi penerus. Organisasi yang tidak memiliki sistem kaderisasi berisiko mengalami keterputusan kepemimpinan, melemahnya identitas, dan berkurangnya kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai perjuangannya. Kaderisasi tidak hanya berlangsung melalui kegiatan pelatihan formal, tetapi juga melalui seluruh aktivitas organisasi yang membentuk pengetahuan, sikap, pengalaman, dan komitmen anggotanya. Proses tersebut memerlukan pola yang sistematis dan terukur agar kader yang dihasilkan sesuai dengan tujuan organisasi serta mampu berkhidmat kepada umat dan masyarakat.¹

Persatuan Islam merupakan salah satu organisasi pembaruan Islam yang menempatkan kegiatan keilmuan sebagai dasar gerakannya. Sejak masa awal perkembangannya, Persis dikenal melalui forum pengkajian agama, kegiatan tabligh, penerbitan majalah dan buku, serta perdebatan mengenai berbagai persoalan keislaman. Howard M. Federspiel menjelaskan bahwa kekuatan gerakan Persis terletak pada penggunaan argumentasi rasional dan usaha mengembalikan pemahaman serta praktik keagamaan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tradisi tersebut membentuk karakter Persis sebagai organisasi dakwah yang tidak hanya menekankan penyampaian ajaran agama, tetapi juga pengembangan kemampuan intelektual anggotanya.²

¹ Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis, *Manhaj Kaderisasi Ikatan Pelajar Persis Masa Jihad 2024–2026*, bagian pendahuluan mengenai kedudukan kaderisasi dan kebutuhan pelatihan yang dibakukan.

² Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaruan Islam Indonesia Abad XX* (Jakarta: LP3ES, 2000), 23–35.

Pendidikan kemudian menjadi salah satu instrumen utama dalam penyebaran pemikiran dan pembentukan kader Persis. Pendirian pesantren, madrasah, kegiatan pengajian, dan penerbitan berbagai bahan bacaan menjadi sarana untuk memperluas pengaruh organisasi sekaligus menyiapkan generasi penerus. Tiar Anwar Bachtiar menjelaskan bahwa perkembangan Persis memiliki hubungan yang kuat dengan pembangunan lembaga pendidikan dan pembentukan tradisi intelektual. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai usaha membentuk pribadi yang mampu memahami, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat.³

Kebutuhan kaderisasi menjadi semakin penting karena keberlangsungan Persis tidak dapat hanya bergantung pada tokoh-tokoh pendiri dan pemimpin pada satu generasi. Organisasi memerlukan kader yang memiliki kesamaan pandangan keagamaan, kemampuan intelektual, keterampilan dakwah, dan loyalitas terhadap jam'iyah. Federspiel menunjukkan bahwa pendidikan yang dikembangkan Persis berperan dalam melahirkan ulama, pendidik, mubalig, dan intelektual yang melanjutkan gerakan pembaruan Islam. Tiar Anwar Bachtiar juga menempatkan kaderisasi sebagai bagian penting dalam pewarisan nilai tajdid, purifikasi ajaran, dan tradisi keilmuan Persis kepada generasi berikutnya.⁴

Pembinaan generasi muda di lingkungan Persis memperoleh bentuk yang lebih khusus melalui pendirian Rijalul Ghad bagi santri putra dan Ummahatul Ghad bagi santri putri pada 1943. RG-UG menjadi organisasi internal pesantren yang memberikan ruang bagi santri untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, pengelolaan kegiatan, dakwah, serta tanggung jawab sosial. Aktivitas seperti muhadharah, halaqah, kajian keislaman, kesiantrian, olahraga, dan seni menjadi sarana untuk menghubungkan pembelajaran di kelas dengan pengalaman

³ Tiar Anwar Bachtiar, *Sejarah Persatuan Islam: Pembaharuan, Purifikasi, dan Perjuangan* (Bandung: Persis Press, 2018), 41–58.

⁴ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaruan Islam Indonesia Abad XX* (Jakarta: LP3ES, 2000), 84–109

berorganisasi. Keberadaan RG-UG memperlihatkan bahwa Persis telah memiliki perhatian terhadap pembentukan calon pemimpin dan kader jam'iyah sejak usia pelajar.⁵

Perkembangan lembaga pendidikan Persis dan penyebaran alumni selanjutnya melahirkan kebutuhan terhadap pola pembinaan yang lebih luas. RG-UG memiliki peranan penting dalam lingkungan pesantren, tetapi struktur tersebut pada dasarnya bersifat internal dan terbatas pada santri di masing-masing lembaga pendidikan. Pelajar Persis yang bersekolah di luar pesantren, alumni yang telah meninggalkan lingkungan pesantren, dan pelajar dari berbagai daerah belum seluruhnya terhubung dalam satu jaringan organisasi. Keadaan tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap wadah yang mampu mempertemukan dan membina pelajar Persis secara lintas pesantren dan lintas sekolah.⁶

Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa berdirinya Ikatan Pelajar Persis tidak dapat dilepaskan dari tradisi pendidikan dan kaderisasi yang telah berkembang dalam tubuh Persatuan Islam. IPP merupakan kelanjutan dari upaya Persis menyiapkan generasi penerus, tetapi dengan ruang gerak yang lebih luas dan struktur yang lebih terkoordinasi. Kehadirannya diarahkan untuk melengkapi pembinaan yang berlangsung melalui pesantren dan RG-UG dengan membentuk jaringan pelajar pada tingkat daerah hingga nasional. IPP dengan demikian dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian kelembagaan Persis terhadap kebutuhan regenerasi, perluasan jaringan pendidikan, dan perubahan kondisi sosial pelajar.

Persatuan Islam merupakan organisasi Islam yang menempatkan pendidikan dan kaderisasi sebagai bagian penting dari gerakan dakwahnya. Pendirian lembaga pendidikan Persis tidak hanya diarahkan untuk menyampaikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga untuk mempersiapkan kader jam'iyah yang

⁵ Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis, *Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Ikatan Pelajar Persis Masa Jihad 2024–2026*.

⁶ Tiar Anwar Bachtiar, *Sejarah Persatuan Islam: Pembaharuan, Purifikasi, dan Perjuangan* (Bandung: Persis Press, 2018), 286–310.

mampu mengajarkan, mengamalkan, dan mendakwahkan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Pesantren Persis yang mulai dikembangkan sejak 1936 menjadi salah satu basis utama kaderisasi tersebut. Misi pendidikan kader jam'iyah menempatkan santri sebagai calon penggerak dakwah yang diharapkan dapat berkhidmat dalam lingkungan Persis maupun masyarakat yang lebih luas.⁷

Pembinaan santri Persis kemudian diperkuat melalui pendirian Rijalul Ghad bagi santri putra dan Ummahatul Ghad bagi santri putri pada 1943. RG dan UG berfungsi sebagai organisasi internal pesantren yang memberikan ruang kepada santri untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas. Kegiatan kajian keislaman, halaqah, muhadharah, kesarifan, olahraga, seni, dan pengelolaan organisasi menjadi media untuk melatih kemampuan berpikir, kepemimpinan, dan pengabdian kepada jam'iyah. Keberadaan RG-UG menunjukkan bahwa kesadaran untuk mempersiapkan kader Persis sejak usia pelajar telah berkembang jauh sebelum berdirinya Ikatan Pelajar Persis.⁸

Perkembangan jumlah pesantren dan penyebaran alumni menghadirkan kebutuhan kaderisasi yang lebih luas daripada ruang internal masing-masing pesantren. RG-UG memiliki kedudukan penting dalam pembinaan santri, tetapi jangkauannya terbatas pada lingkungan pesantren dan belum mampu menghubungkan seluruh pelajar Persis dalam satu gerakan yang terkoordinasi. Sejumlah alumni pesantren juga diketahui berkiprah dalam organisasi di luar Persis, sedangkan santri dari sekolah non-Persis belum memperoleh ruang yang memadai untuk terlibat dalam gerakan pelajar Persis. Kondisi tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan tokoh dan asatiz Persis mengenai pentingnya organisasi

⁷ Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis, *Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Ikatan Pelajar Persis Masa Jihad 2024–2026*, bagian sejarah pendidikan dan kaderisasi Persatuan Islam.

⁸ Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis, *Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Ikatan Pelajar Persis Masa Jihad 2024–2026*, bagian sejarah Rijalul Ghad dan Ummahatul Ghad.

pelajar yang memiliki cakupan lintas pesantren, lintas sekolah, dan dapat bergerak pada tingkat daerah hingga nasional.⁹

Genealogi pembentukan organisasi pelajar Persis berlangsung melalui proses yang panjang. Forum Silaturahmi Komunikasi Pelajar Persis dibentuk di Garut pada 1993, kemudian pada 1996 berlangsung pertemuan RG-UG di Pesantren Persis Benda, Tasikmalaya, yang menghasilkan gagasan forum komunikasi tingkat daerah, wilayah, dan nasional. Wacana pendirian Ikatan Pelajar Persis semakin menguat dalam Silaturahmi Nasional Santri Persis di Cibubur pada 2005. Silaturahmi Nasional II di Kiara Payung, Sumedang, pada 2008 melahirkan Majelis Presidium IPP yang beranggotakan para ketua RG-UG dari berbagai pesantren Persis. Pertemuan di kantor Pimpinan Pusat Persis pada 2009 kemudian menyepakati perlunya pembentukan organisasi pelajar Persis secara formal.¹⁰

Kongres Nasional Pelajar Persis yang dilaksanakan di Garut pada 22–23 September 2010 menjadi puncak dari proses tersebut. Kongres menghasilkan deklarasi Ikatan Pelajar Persis pada 23 September 2010 dan menetapkan Andi Muhammad Nurdin sebagai ketua umum pertama. Pembentukan IPP memberikan ruang baru bagi pelajar Persis untuk terlibat dalam organisasi yang cakupannya lebih luas daripada struktur internal pesantren. IPP tidak dimaksudkan untuk menggantikan RG-UG, melainkan melengkapi pola pembinaan yang telah ada dengan menghubungkan pelajar dan santri dari berbagai lembaga pendidikan melalui struktur pimpinan pusat dan pimpinan daerah.¹¹

⁹ Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis, *Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Ikatan Pelajar Persis Masa Jihad 2024–2026*, bagian yang menjelaskan keterbatasan RG-UG dan kegelisahan mengenai kaderisasi pelajar Persis.

¹⁰ Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis, *Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Ikatan Pelajar Persis Masa Jihad 2024–2026*, bagian sejarah FSK, forum komunikasi pelajar, Silatnas, dan Majelis Presidium IPP.

¹¹ Wawancara tertulis dengan Ryan Alviana mengenai *Sejarah pendirian IPP-IPPi, Kongres Nasional Pelajar Persis di Garut, dan deklarasi IPP pada 23 September 2010*, dikonfirmasi oleh Andi Muhammad Nurdin, Ketua Umum pertama Ikatan Pelajar Persis, dalam wawancara melalui Google Meet, 20 November 2025

Periode awal kepemimpinan IPP masih dihadapkan pada persoalan penerimaan dan pencarian bentuk organisasi. Hubungan antara IPP dan RG-UG menjadi salah satu persoalan yang sering dipertanyakan oleh pimpinan pesantren dan tokoh Persis. Sebagian pihak mengkhawatirkan bahwa IPP akan menggantikan kedudukan RG-UG, sedangkan pihak lain memandang kehadirannya sebagai kebutuhan untuk memperluas kaderisasi pelajar. Kepengurusan awal harus melakukan sosialisasi, membangun kesepahaman, membentuk pimpinan daerah, dan meyakinkan berbagai unsur Persis bahwa IPP memiliki fungsi yang berbeda tetapi tetap berhubungan dengan sistem kaderisasi jam'iyah. Kondisi tersebut menyebabkan penguatan legitimasi dan perluasan organisasi lebih banyak menjadi perhatian dibandingkan penyusunan sistem kaderisasi yang lengkap.

Perekrutan anggota pada masa awal IPP masih banyak dilakukan melalui hubungan personal. Pengurus mengajak teman, anggota RG-UG, dan pelajar dari jaringan pesantren untuk bergabung tanpa melalui jenjang kaderisasi yang seragam. Gagasan mengenai ROFI I, ROFI II, dan ROFI III mulai dibicarakan di tengah masa kepemimpinan awal sebagai upaya membentuk pola pembinaan yang lebih terarah. Kegiatan Training ROFI I di Pesantren Persis 50 Lembang pada 2012 belum merupakan kaderisasi bagi calon anggota, melainkan persiapan bagi pengurus pusat dan daerah untuk memahami rancangan kegiatan yang akan diterapkan. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa pada 2010–2014 ROFI masih berada dalam tahap perumusan dan percobaan, sedangkan pelaksanaannya belum sepenuhnya memiliki kurikulum, instruktur, evaluasi, dan mekanisme administrasi yang seragam.¹²

Formalisasi kaderisasi semakin berkembang pada periode 2015–2021. Kepemimpinan Birri Rahman memperkuat manhaj dan mendorong pelaksanaan ROFI pada tingkat daerah. Kepemimpinan Arman Nur Hakim melanjutkan

¹² Wawancara dengan Zamzam Aqbil Raziqin, transkrip wawancara, menit 22:12–23:42. Narasumber menjelaskan bahwa perekrutan awal dilakukan melalui ajakan personal, sedangkan Training ROFI I di Lembang pada 2012 merupakan persiapan pengurus dan belum menjadi kaderisasi peserta. dikonfirmasi oleh Andi Muhammad Nurdin, Ketua Umum pertama Ikatan Pelajar Persis, dalam wawancara melalui Google Meet, 20 November 2025

perluasan kegiatan kaderisasi dengan meningkatkan pendampingan pimpinan pusat terhadap daerah. ROFI I mulai diposisikan sebagai pintu masuk kader di tingkat daerah, sedangkan ROFI II diarahkan untuk menyiapkan kader pelanjut bagi tanggung jawab organisasi yang lebih tinggi. Perkembangan tersebut menunjukkan perubahan IPP dari organisasi yang bergantung pada perekrutan personal menjadi organisasi yang mulai memiliki jalur regenerasi, meskipun variasi metode, kelengkapan administrasi, dan kualitas pelaksanaan masih ditemukan di berbagai daerah.

Kepemimpinan Rifqi Rifyal Rizaldi sejak Mukhtar V tahun 2020 menghadapi keadaan pandemi Covid-19 yang membatasi pelaksanaan program dan persidangan organisasi. Sejumlah produk kaderisasi belum dapat dirampungkan sehingga kepengurusan baru masih menggunakan pedoman dari periode sebelumnya sambil melakukan penyesuaian. Durasi ROFI dipersingkat, jumlah peserta dibatasi, dan beberapa daerah mengusulkan kegiatan secara daring. Pemulihan pascapandemi kemudian dimanfaatkan untuk mengaktifkan kembali pimpinan daerah yang vakum, memperkuat komunikasi kader, dan mempersiapkan perjuangan kelembagaan menuju otonomisasi.¹³

Pengesahan IPP sebagai bagian otonom Persatuan Islam dalam Mukhtar XVI Persis di Soreang pada 25 September 2022 menjadi titik penting dalam perkembangan organisasi. Status otonom memberikan legitimasi yang lebih jelas bagi IPP untuk menjalankan pembinaan pelajar, membentuk struktur, mengelola kaderisasi, dan membangun hubungan dengan unsur-unsur Persis. Mukhtar VI IPP di Garut pada 2024 menerjemahkan kedudukan tersebut melalui perubahan identitas organisasi, penataan struktur kepemimpinan, pembentukan Badan

¹³ Wawancara dengan Rifqi Rifyal Rizaldi. Narasumber menjelaskan penggunaan pedoman lama, kajian pembaruan produk kaderisasi, dan penyesuaian pelaksanaan ROFI selama pandemi Covid-19. memiliki kesesuaian dengan keterangan Biri Rahman, Ketua Umum Ikatan Pelajar Persis Masa Jihad 2015–2017, dalam wawancara terpisah

Pengelola Training, serta penyusunan perangkat kaderisasi yang mencakup Ta'aruf, ROFI I, ROFI II, ROFI III, dan Training for Trainer.¹⁴

Sistem kaderisasi yang disusun pada 2024 memperlihatkan pembagian jenjang yang semakin jelas. Ta'aruf digunakan sebagai fase pengenalan, ROFI I sebagai fase ideologisasi bagi kader tingkat daerah, ROFI II sebagai fase transformasi bagi calon penggerak tingkat wilayah, dan ROFI III sebagai fase dinamisasi untuk menyiapkan kader tingkat pusat. Training for Trainer diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam meregenerasi anggota berikutnya. Badan Pengelola Training bertanggung jawab terhadap pengaturan instruktur, pelaksanaan, evaluasi, kelulusan, pendataan, dan pembinaan pascatraining. Perangkat tersebut menunjukkan bahwa ROFI telah berkembang dari gagasan awal menjadi sistem kaderisasi yang memiliki kurikulum, jenjang, standar administrasi, dan hubungan langsung dengan struktur kepemimpinan organisasi.¹⁵

Peran IPP dalam kaderisasi tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan. Organisasi ini menjadi ruang pertemuan pelajar dari berbagai pesantren, media penanaman ideologi Persis, tempat pembelajaran kepemimpinan, dan jalur untuk melanjutkan pengabdian pada tingkat organisasi yang lebih tinggi. Sejumlah alumni IPP-IPPI kemudian diketahui aktif dalam Hima dan Himi Persis, Pemuda dan Pemudi Persis, lembaga bantuan hukum, media, serta lembaga pendidikan dan pesantren Persis. Kiprah tersebut tidak dapat dipandang sebagai hasil ROFI semata karena pembentukan kader juga berlangsung melalui pesantren, RG-UG, keluarga, dan pengalaman organisasi lainnya. Keberadaan alumni dalam berbagai unsur

¹⁴ Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis, *Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Ikatan Pelajar Persis Masa Jihad 2024–2026*, bagian sejarah otonomisasi; serta Laporan Kerja IPP yang memuat keputusan Mukhtar VI mengenai pembentukan BPT, BKC, ROFI III, TOT, dan penyusunan pedoman organisasi.

¹⁵ Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis, *Manhaj Kaderisasi Ikatan Pelajar Persis Masa Jihad 2024–2026*, bagian fase dan alur kaderisasi serta kedudukan Badan Pengelola Training.

jam'iyah tetap menunjukkan bahwa IPP telah menjadi salah satu ruang penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia bagi keberlanjutan Persatuan Islam.¹⁶

Jawa Barat memiliki kedudukan penting dalam sejarah tersebut karena sebagian besar proses pembentukan dan perkembangan awal IPP berlangsung di wilayah ini. Garut menjadi tempat berdirinya FSK dan pelaksanaan Kongres Nasional 2010, Tasikmalaya menjadi lokasi pertemuan RG-UG pada 1996, sedangkan Sumedang menjadi tempat pembentukan Majelis Presidium pada 2008. Perkembangan pimpinan daerah di Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Ciamis, dan wilayah lainnya juga menjadikan Jawa Barat sebagai ruang utama penerapan serta pengembangan ROFI. Pemilihan Jawa Barat sebagai wilayah penelitian memungkinkan penelusuran yang lebih mendalam terhadap hubungan antara basis pesantren, perkembangan kelembagaan, dan proses kaderisasi IPP.

Kajian mengenai Ikatan Pelajar Persis selama ini lebih banyak menempatkan sejarah pendirian, perkembangan struktur, atau kegiatan organisasi sebagai pembahasan utama. Proses perubahan kaderisasi dari perekrutan personal menuju sistem ROFI yang berjenjang masih memerlukan pembahasan historis yang lebih khusus. Penelitian ini penting untuk menjelaskan bagaimana IPP merumuskan perannya sebagai organisasi kader, bagaimana ROFI berkembang dalam situasi organisasi yang berubah, serta bagaimana otonomisasi memengaruhi sistem pembinaan pelajar Persis. Kajian tersebut juga diperlukan untuk menunjukkan bahwa kaderisasi bukan sekadar rangkaian kegiatan pelatihan, melainkan proses institusionalisasi yang berkaitan dengan legitimasi, regenerasi kepemimpinan, perluasan jaringan, dan keberlanjutan Persatuan Islam.

¹⁶ Wawancara tertulis dengan Ryan Alviana mengenai kiprah alumni IPP-IPPi dalam Hima, Himi, Pemuda, Pemudi, lembaga Persis, dan lembaga Pendidikan dikonfirmasi oleh Zamzam Aqbil Raziqin, pengurus bidang kaderisasi IPP periode pertama dan kedua, dalam wawancara di Bandung, 15 November 2025.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada peran Ikatan Pelajar Persis dalam kaderisasi pelajar Persis di Jawa Barat pada 2010–2024. Batas awal 2010 dipilih karena menandai berdirinya IPP secara formal, sedangkan 2024 menjadi batas akhir karena pada tahun tersebut Mukthamar VI menyusun perangkat kelembagaan dan sistem kaderisasi yang lebih lengkap setelah otonomisasi. Pembahasan diarahkan pada sejarah pembentukan dan perkembangan IPP, perumusan awal kaderisasi pada 2010–2014, formalisasi ROFI pada 2015–2021, serta penguatan kelembagaan melalui otonomisasi pada 2022–2024. Periodisasi tersebut diharapkan dapat memperlihatkan kesinambungan dan perubahan peran IPP dalam membina pelajar sekaligus menyiapkan generasi penerus Persatuan Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah pembentukan dan perkembangan Ikatan Pelajar Persis di Jawa Barat, ditinjau dari Persatuan Islam sebagai basis gerakan kaderisasi, genealogi gerakan pelajar Persis, proses pendirian, serta sistem struktur dan kelembagaannya?
2. Bagaimana peran Ikatan Pelajar Persis dalam mengembangkan sistem kaderisasi pelajar Persis di Jawa Barat pada tahun 2010–2024, mulai dari perumusan awal kaderisasi, formalisasi sistem ROFI, hingga otonomisasi Ikatan Pelajar Persis?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sejarah pembentukan serta perkembangan Ikatan Pelajar Persis di Jawa Barat, meliputi kedudukan Persatuan Islam sebagai basis gerakan kaderisasi, genealogi gerakan pelajar Persis, proses pendirian IPP, serta perkembangan struktur dan kelembagaannya.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis peran Ikatan Pelajar Persis dalam mengembangkan sistem kaderisasi pelajar Persis di Jawa Barat pada tahun 2010–2024, mulai dari perumusan awal sistem kaderisasi, formalisasi kaderisasi ROFI, hingga proses otonomisasi Ikatan Pelajar Persis.

D. Kajian pustaka

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai literatur yang mendukung proses rekonstruksi. Sumber-sumber yang digunakan sebagai rujukan analisis dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun beberapa pustaka yang dijadikan landasan penelitian ini antara lain:

1. Alghozali, Ahmad Mirshad. (2024). Pembentukan Kepemimpinan dalam Organisasi Keagamaan: Analisis Latihan Kader Utama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 5(1), 74–87.

Jurnal ini mengkaji bagaimana IPNU membentuk kualitas kepemimpinan kadernya melalui model pelatihan utama (Lakut). Penelitian ini menekankan aspek ideologis, nasionalisme, dan pembentukan otoritas moral yang menjadi fondasi kepemimpinan dalam organisasi keagamaan. Alghozali menegaskan bahwa “proses kaderisasi tidak semata mentransfer pengetahuan organisasi, tetapi membangun kesadaran ideologis yang terinternalisasi dalam praktik kepemimpinan kader.”¹⁷ Temuan jurnal menunjukkan bahwa pelatihan kader berfungsi tidak hanya sebagai transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai rekonstruksi identitas dan legitimasi organisasi keagamaan.

Karya ini menjadi rujukan penting bagi penulis sebagai pembanding bentuk kaderisasi pada organisasi pelajar Islam lain, terutama karena IPNU memiliki struktur kaderisasi yang mapan. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan pendekatan, di mana jurnal ini menyoroti aspek

¹⁷ Ahmad Mirshad Alghozali, “Pembentukan Kepemimpinan dalam Organisasi Keagamaan: Analisis Latihan Kader Utama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Yogyakarta,” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 5, no. 1 (2024): 80.

kepemimpinan dan ideologi, sementara penelitian penulis mengkaji sejarah dan evolusi sistem kaderisasi ROFI dalam IPP 2010–2024, termasuk proses pembentukannya sebagai lembaga baru dalam struktur Persis.

2. Rifaldi, Fakhri. (2023). *Kaderisasi di Lingkungan Organisasi Otonom Nahdlatul Ulama* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Skripsi ini membahas mekanisme kaderisasi pada organisasi otonom Nahdlatul Ulama serta bagaimana kaderisasi berfungsi sebagai strategi pengembangan sumber daya organisasi. Penelitian tersebut menggambarkan adanya relasi erat antara struktur kelembagaan dan pola pembinaan kader dalam menjaga kesinambungan gerakan keagamaan. Rifaldi menegaskan bahwa “kaderisasi dalam organisasi otonom NU merupakan instrumen strategis untuk memastikan regenerasi kepemimpinan dan kesinambungan nilai ideologis organisasi.”¹⁸ Temuan ini memperlihatkan bahwa kaderisasi tidak hanya dipahami sebagai proses pelatihan, melainkan sebagai sistem reproduksi struktur dan identitas organisasi.

Relevansi skripsi ini terhadap penelitian penulis terletak pada aspek metodologis dan fokus tema kaderisasi pada organisasi otonom keagamaan. Namun, perbedaan utamanya ialah penelitian ini bersifat institusional dan teoritis, sementara penelitian penulis bersifat historis-deskriptif, dengan merekonstruksi proses pembentukan serta perkembangan ROFI sebagai sistem kaderisasi pelajar Persis dalam kurun 2010–2024.

3. Fauzan, Pepen Irpan dkk. (2024). Pola Kaderisasi Gerakan Islam Puritan: Studi Kritis atas Persatuan Islam. *Millah: Journal of Religious Studies*, 24(2).

Artikel ini mengkaji pola kaderisasi dalam Persatuan Islam (Persis) serta menelusuri bagaimana konsep kaderisasi berkembang dari tradisi kultural berbasis majelis taklim dan halaqah menjadi struktur yang lebih formal dan sistematis.

¹⁸ Fakhri Rifaldi, *Kaderisasi di Lingkungan Organisasi Otonom Nahdlatul Ulama* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), 45.

Kajian ini memperlihatkan bahwa kaderisasi di Persis merupakan bagian dari proyek ideologis modernisme Islam yang menekankan rasionalitas, pemurnian ajaran, dan penguatan literasi agama. Fauzan dkk. menyatakan bahwa “kaderisasi dalam Persis tidak sekadar proses transfer ilmu, melainkan mekanisme reproduksi ideologi yang memastikan kesinambungan gerakan purifikasi Islam.”¹⁹ Pernyataan ini menegaskan bahwa kaderisasi ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam menjaga identitas teologis dan arah perjuangan organisasi.

Jurnal ini memberikan kerangka teoretis dan historis mengenai kaderisasi dalam tubuh Persis sebagai jam‘iyyah induk, tetapi tidak menyinggung IPP sebagai organisasi otonom pelajar. Dengan demikian, penelitian penulis menghadirkan pembaruan dalam bentuk kajian historis yang lebih spesifik terhadap IPP dan ROFI sebagai entitas kaderisasi baru dalam tubuh Persis, yang belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya.

4. Syaifudin, Nur. (2021). *Pembinaan dan Kaderisasi Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Skripsi ini mengangkat pembinaan kader pada organisasi PII sebagai organisasi pelajar Islam tertua di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa kaderisasi di PII didesain dalam struktur sosial-keagamaan yang mengombinasikan pendidikan moral, penguatan kognitif, serta militansi ideologis sebagai fondasi gerakan. Syaifudin menegaskan bahwa “kaderisasi merupakan jantung organisasi, karena melalui proses inilah identitas, loyalitas, dan kesinambungan gerakan PII dipertahankan.”²⁰ Penekanan tersebut memperlihatkan bahwa kaderisasi tidak hanya dipahami sebagai program kerja rutin, tetapi sebagai mekanisme strategis dalam menjaga eksistensi dan arah ideologis organisasi pelajar Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjek organisasi pelajar Islam dan proses kaderisasi sebagai fokus kajian. Perbedaannya

¹⁹ Pepen Irpan Fauzan dkk., “*Pola Kaderisasi Gerakan Islam Puritan: Studi Kritis atas Persatuan Islam*,” *Millah: Journal of Religious Studies* 24, no. 2 (2024): 215.

²⁰ Nur Syaifudin, *Pembinaan dan Kaderisasi Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 78.

adalah pada pendekatan dan ruang lingkup, di mana skripsi ini lebih menyoroti model pembinaan kontemporer dalam konteks PII, sedangkan penelitian penulis mengkaji evolusi historis dari pendirian hingga perkembangan kaderisasi ROFI dalam IPP sejak 2010–2024. Dengan demikian, penelitian penulis menawarkan pembaruan berupa kerangka historiografi organisasi pelajar Islam yang belum ditangani secara mendalam dalam skripsi tersebut.

5. Hidayat, K. R. R., & Irpinskyah. (2023). Manajemen kurikulum kaderisasi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dalam pencegahan paham radikalisme pada pelajar Nahdlatul Ulama. *Al-Basyar: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 28–42.

Jurnal tersebut membahas secara mendalam mengenai manajemen kurikulum kaderisasi yang diterapkan oleh PP IPNU sebagai instrumen preventif dalam menangkal paham radikalisme di kalangan pelajar. Peneliti menunjukkan bahwa sistem kaderisasi yang berjenjang mulai dari Makesta, Lakmud, hingga Laknas memiliki fungsi strategis dalam mentransmisikan ideologi keislaman dan keindonesiaan yang moderat kepada generasi pelajar muda. Dalam konteks tersebut, tahapan kaderisasi tidak hanya dipahami sebagai proses perekrutan anggota baru, tetapi juga sebagai medium internalisasi nilai, penguatan identitas organisasi, serta pembangunan habitus sosial yang selaras dengan kultur keagamaan NU. Hidayat dan Irpinskyah menegaskan bahwa “manajemen kurikulum kaderisasi menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran ideologis dan komitmen kebangsaan kader pelajar secara sistematis dan berkelanjutan.”²¹ Pembahasan ini memperlihatkan bahwa organisasi pelajar Islam dapat merespons isu radikalisme dan disorientasi nilai melalui pendekatan pendidikan yang terstruktur dan terencana.

²¹ K. R. R. Hidayat dan Irpinskyah, “Manajemen Kurikulum Kaderisasi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dalam Pencegahan Paham Radikalisme pada Pelajar Nahdlatul Ulama,” *Al-Basyar: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 2, no. 1 (2023): 35.

Relevansi jurnal ini terhadap penelitian penulis terletak pada aspek pembahasan mengenai komponen manajemen kurikulum, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi. Keempat komponen tersebut menjadi landasan konseptual penting dalam memahami bagaimana suatu sistem kaderisasi dapat dirancang dan dijalankan secara efektif dalam organisasi keagamaan. Namun demikian, pembaruan yang diangkat dalam penelitian penulis berbeda dari jurnal tersebut, yakni fokus pada strategi kaderisasi di tingkat lokal dalam konteks IPP yang menghadapi tantangan sosiokultural berbeda serta bekerja dalam kerangka ideologis Persatuan Islam (Persis) yang bercorak tajdid dan rasionalistik. Dengan demikian, penelitian penulis memposisikan diri sebagai studi historis-organisatoris yang menelaah evolusi sistem kaderisasi ROFI dari skala lokal hingga regional, serta memperkaya kajian mengenai manajemen kurikulum kaderisasi berbasis organisasi keagamaan dalam lanskap pelajar Islam kontemporer.

6. Cholis, M. N. (2021). Manajemen kaderisasi dalam mencetak kader organisasi militan. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 6(1), 41–51.

Jurnal ini mengeksplorasi secara sistematis strategi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pengkaderan di STAI Luqman Al-Hakim Surabaya sebagai institusi pendidikan yang berorientasi pada pembentukan kader militan bagi organisasi Hidayatullah. Peneliti menyoroti bahwa keberhasilan kaderisasi tidak hanya bergantung pada desain instruksional semata, tetapi juga pada kemampuan institusi dalam mengintegrasikan kurikulum berbasis sistematika wahyu dan wawasan pergerakan Islam ke dalam pengalaman belajar para kader. Cholis menegaskan bahwa “kaderisasi merupakan proses pembentukan militansi yang terencana melalui integrasi kurikulum, pembiasaan nilai, dan kontrol organisasi yang sistematis.”²² Melalui pendekatan tersebut, kader tidak hanya dibentuk secara kognitif dan spiritual, tetapi juga ideologis, sehingga menghasilkan

²² M. N. Cholis, “Manajemen Kaderisasi dalam Mencetak Kader Organisasi Militan,” *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)* 6, no. 1 (2021): 45.

militansi yang berakar pada kesadaran dakwah dan komitmen pergerakan. Dalam perspektif ini, penelitian tidak hanya menyoroti dimensi pedagogis, tetapi juga memperlihatkan bagaimana doktrin organisasi diterjemahkan menjadi praktik kaderisasi yang operasional.

Relevansi jurnal ini bagi penelitian penulis terletak pada kesamaan metodologis dalam penggunaan pendekatan studi kasus untuk melihat manajemen kaderisasi dari fase perencanaan hingga evaluasi. Khususnya, adanya penekanan pada indikator evaluatif melalui kiprah kader dan testimoni alumni memberikan acuan penting mengenai bagaimana keberhasilan kaderisasi dapat diukur secara empiris. Namun, penelitian penulis menghadirkan pembaruan melalui analisis mengenai pembentukan militansi kader dalam konteks organisasi yang lebih terbuka dan inklusif, dibandingkan dengan model boarding school yang menjadi locus penelitian Cholis. Dengan demikian, penelitian penulis memperluas wacana kaderisasi keagamaan dengan fokus pada organisasi pelajar yang bergerak dalam ruang sosial yang lebih cair dan heterogen, serta bekerja dalam konteks ideologi Persatuan Islam yang bercorak tajdid-intelektual.

7. Rahmawati, R. F. (2016). Kaderisasi dakwah melalui lembaga pendidikan Islam. *TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 147–167.

Jurnal ini membahas peran strategis lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pondok pesantren, dalam menyiapkan santri sebagai kader penerus dakwah. Peneliti menegaskan bahwa proses kaderisasi tidak hanya berkutat pada transfer pengetahuan keislaman, tetapi juga pada pembentukan karakter melalui internalisasi nilai, kedisiplinan, dan keteladanan yang berlangsung dalam lingkungan pendidikan Islam. Rahmawati menyatakan bahwa “kaderisasi dakwah merupakan proses sistematis yang menanamkan nilai, komitmen, dan tanggung jawab sosial melalui pembiasaan dalam kultur pendidikan Islam.”²³ Internalisasi nilai-nilai tersebut diperkuat melalui aturan, ritus harian, serta interaksi sosial yang

²³ R. F. Rahmawati, “Kaderisasi Dakwah melalui Lembaga Pendidikan Islam,” *TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 1 (2016): 154.

didesain untuk menumbuhkan kepekaan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam diposisikan bukan hanya sebagai institusi pengajaran, tetapi sebagai sistem kaderisasi yang secara sadar mengembangkan identitas keagamaan, komitmen dakwah, dan ketangguhan mental para santri.

Relevansi jurnal ini bagi penelitian penulis terletak pada pemberiannya gambaran komprehensif mengenai konsep kaderisasi berbasis pendidikan formal dan non-formal, serta fungsi kaderisasi dalam menjamin keberlanjutan SDM dakwah. Konsep tersebut memperkuat argumen bahwa proses regenerasi kader dalam organisasi keagamaan merupakan kebutuhan struktural yang selalu berulang dalam sejarah gerakan dakwah Islam. Meskipun demikian, pembaruan yang dikembangkan penulis terletak pada analisis efektivitas kaderisasi dakwah dalam konteks organisasi kepemudaan kontemporer di luar lingkungan pesantren, seperti Ikatan Pelajar Persis, untuk melihat sejauh mana nilai-nilai tradisional pesantren dapat diadaptasi dan ditransformasikan dalam model organisasi modern yang lebih terbuka dan berorientasi pada rasionalitas tajdid.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu suatu proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis berbagai catatan maupun peninggalan dari masa lampau. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan karya ilmiah yang objektif, sistematis, dan logis.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan historis yang disajikan secara analitis, dengan tujuan merekonstruksi peristiwa masa lalu secara runtut dan objektif. Proses tersebut mencakup tahapan pengumpulan, evaluasi, verifikasi, serta sintesis bukti-bukti, sehingga dapat menegaskan fakta sekaligus menarik kesimpulan yang kuat.²⁴

²⁴ Wasino dan Endah Sri Hartatik, dalam *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*, 1 ed. (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), Hal. 5-6

Menurut Louis Gottschalk, metode penelitian sejarah merupakan suatu proses pengujian dan penganalisisan secara kritis terhadap berbagai catatan maupun peninggalan masa lampau. Metode ini mencakup empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.²⁵

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan historis dengan penyajian analitis, yang bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan objektif. Prosesnya meliputi pengumpulan, evaluasi, verifikasi, serta sintesis bukti-bukti agar dapat menegakkan fakta dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun tahapan metode penelitian sejarah dalam penulisan ini meliputi: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik bukanlah suatu ilmu, melainkan lebih merupakan teknik atau seni dalam proses penelitian sejarah. Heuristik adalah tahap pengumpulan sumber-sumber, baik yang bersifat tertulis seperti arsip dan dokumen, hasil wawancara, maupun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Pada dasarnya, heuristik dalam sejarah serupa dengan kegiatan bibliografi dalam hal pencarian buku-buku cetakan. Namun, seorang sejarawan tidak hanya bergantung pada bahan-bahan tertulis yang tersedia dalam bentuk buku, melainkan juga harus memanfaatkan berbagai material lain. Jika sumber yang diperlukan berupa dokumen resmi, maka pencariannya dilakukan melalui arsip, lembaga pengadilan, perpustakaan pemerintah, rekaman, serta sumber-sumber sejenis lainnya. Hal yang dilakukan penulis pada tahapan heuristik adalah melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Dalam memperoleh sumber-sumber kepustakaan mengenai penelitian.

A. Sumber primer

Sumber primer merujuk pada informasi asli atau data mentah yang belum mengalami analisis maupun interpretasi dari pihak lain. Sumber ini diperoleh langsung dari objek atau subjek yang menjadi fokus kajian.

²⁵ Gottschalk, L. (1985). *Mengerti sejarah: Pengantar metode sejarah*. UI-Press

Beberapa contoh sumber primer meliputi artikel jurnal yang memuat hasil penelitian asli, laporan penelitian, tesis, disertasi, hasil survei, dokumen resmi pemerintah, wawancara langsung, serta artefak sejarah. Kelebihan dari sumber primer adalah kemampuannya dalam memberikan informasi yang otentik dan akurat karena berasal langsung dari sumbernya. Namun, penggunaannya memerlukan ketelitian dalam penafsiran, sebab tanpa analisis yang cermat, data tersebut dapat menimbulkan bias. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan oleh penulis mencakup hasil wawancara serta berbagai tulisan langsung dari sumber yang relevan.

a. Sumber lisan

1. Lamlam Pahala, M.Ag yang berusia 45 tahun, beliau adalah mantan ketua umum Hima persis ke IV. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 November 2025. Wawancara di lakukan secara offline/tatap muka secara langsung. Di lakukan wawancara di gedung kementerian pendidikan, jakarta.
2. Ryan Alviana, M.Pd yang berusia 34 tahun. Beliau adalah ketua majelis presidium (formatur pendirian IPP). Penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 November 2025. Wawancara di lakukan secara offline/tatap muka secara langsung. Di lakukan wawancara di gedung kementerian pendidikan, jakarta.
3. Andi M Nurdin yang berusia 32 tahun. Beliau adalah ketua umum Ikatan Pelajar Persis ke-I (2010-2012). Penulis melakukan wawancara pada tanggal 20 November 2025. Wawancara di lakukan secara online/tatap muka secara daring. Di lakukan wawancara melalui platform google meet.
4. Zamzam Aqbil Raziqin M.H yang berusia 32 tahun. Beliau sebagai bidang kaderisasi periode ke-1 dan ke-2. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 15 November 2025. Wawancara di lakukan secara offline/tatap muka secara langsung. Di lakukan wawancara di rumah/kediaman beliau, Bandung.

5. Husna Hisaba Kholid, S.Hum yang berusia 31 tahun. Beliau adalah ketua umum Ikatan Pelajar Persis ke-2 (2012-2014). Penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 November 2025. Wawancara di lakukan secara offline/tatap muka secara langsung. Di lakukan wawancara di gedung kementrian pendidikan, jakarta.
6. Birri Rahman, S.Pd yang berusia 29 tahun. Beliau adalah mantan ketua umum Ikatan Pelajar Persis ke-3 (2015-2017). Penulis melakukan wawancara pada tanggal 25 November 2025. Wawancara di lakukan secara offline/tatap muka secara langsung. Di lakukan wawancara di rumah/kediaman beliau, Bandung.
7. Arman Nur Hakim M, S.Ag yang berusia 27 tahun. Beliau adalah mantan ketua umum Ikatan Pelajar Persis ke-4 (2017-2019). Penulis melakukan wawancara pada tanggal 29 November 2025. Wawancara di lakukan secara offline/tatap muka secara langsung. Di lakukan wawancara di rumah/kediaman beliau, Bandung.
8. Rifqi Rifyal Rizaldi, S.Sos yang berusia 25 tahun. Beliau adalah mantan ketua umum Ikatan Pelajar Persis ke-5 (2020-2024). Penulis melakukan wawancara pada tanggal 03 Desember 2025. Wawancara di lakukan secara offline/tatap muka secara langsung. Di lakukan wawancara di rumah/kediaman beliau, Bandung.
9. Ferdiansyah yang berusia 24 tahun. Beliau adalah ketua umum Ikatan Pelajar Persis ke-5 (2024-2026). Penulis melakukan wawancara pada tanggal 06 Desember 2025. Wawancara di lakukan secara offline/tatap muka secara langsung. Di lakukan wawancara di gedung kantor pimpinan pusat Persatuan Islam, Bandung.
10. Fathi Yakan Alfawwaz yang berusia 21 tahun. Beliau adalah ketua bidang kaderisasi Ikatan Pelajar Persis periode (2024-2026). Penulis melakukan wawancara pada tanggal 06 Desember 2025. Wawancara di lakukan secara offline/tatap muka secara langsung. Di lakukan wawancara di gedung kantor Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Bandung.

b. Sumber tulisan

1. QA-QD (Qanun Asasi-Qanun Dakhili) Ikatan Pelajar Persis ialah AD-ART (Aturan Dasar-Aturan Rumah Tangga) nya Organisasi Ikatan Pelajar Persis, guna dari Ad-ART adalah sebagai dasar hukum internal, acuan pengelolaan sehari-hari, penentu hak dan kewajiban anggota, serta legitimasi hubungan dengan pihak luar, memastikan organisasi berjalan terstruktur, terarah, dan mencapai tujuannya secara sah dan berkelanjutan.
2. Manhaj kaderisasi Ikatan Pelajar Persis adalah sebuah pedoman yang mengatur term, batasan, atau role model apa yang harus di capai dalam kegiatan kaderisasi. Manhaj kaderisasi ini juga mengatur bagaimana kader harus mengikuti kegiatan kaderisasi hingga selesai. Juga ada tahapan tahapan kaderisasi yang harus di tuntaskan.
3. Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Ikatan Pelajar Persis Masa Jihad 2024–2026 merupakan dokumen resmi yang memuat arah gerakan, tujuan, program, karakter kader, dan kebijakan organisasi. GBHO menempatkan IPP sebagai organisasi kader yang berorientasi pada tajdid, penguatan intelektual, dan pembentukan akhlak Islami. Kader yang diharapkan ialah generasi *Ar-Rasikhuna fil 'Ilmi* yang berjati diri *Ibadurrahman*, berpikir kritis, serta bertanggung jawab terhadap umat, bangsa, dan negara. Dokumen ini termasuk sumber primer karena diterbitkan langsung oleh Pimpinan Pusat IPP sebagai pedoman resmi organisasi pada periode 2024–2026.
4. Program kerja Pimpinan Pusat IPP masa jihad 2010–2012. Dokumen ini diperoleh melalui arsip internal organisasi dan dikonfirmasi keberadaannya melalui keterangan para aktor awal IPP, khususnya ketua umum periode pertama dan tim formatur pendirian. Penelusuran terhadap sumber ini difokuskan pada identifikasi program-program awal yang berkaitan dengan konsolidasi organisasi dan perumusan awal kaderisasi pelajar Persis. Dalam konteks heuristik, dokumen ini penting

untuk merekonstruksi kondisi awal sebelum ROFI terbentuk sebagai sistem kaderisasi yang terstruktur.

5. Program kerja periode 2012–2014 dokumen ini diperoleh dari arsip Pimpinan Pusat IPP dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan ketua umum periode kedua. Penelusuran sumber ini diarahkan untuk mengidentifikasi perubahan orientasi program kaderisasi, khususnya mulai munculnya istilah dan praktik ROFI dalam agenda organisasi. Dokumen ini menjadi rujukan penting untuk menelusuri transisi kaderisasi IPP dari fase konseptual menuju fase implementatif.
6. Program kerja masa jihad 2015–2017 diperoleh melalui dokumentasi organisasi yang lebih sistematis dan lengkap dibandingkan periode sebelumnya. Dokumen ini diklasifikasikan sebagai sumber primer yang mencerminkan fase konsolidasi IPP secara struktural dan ideologis. Penelusuran terhadap sumber ini difokuskan pada pemetaan tahapan kaderisasi yang mulai dirumuskan secara lebih jelas serta upaya standarisasi pelaksanaan ROFI di tingkat wilayah dan daerah. Program kerja ini menjadi sumber penting untuk menelusuri perkembangan institusionalisasi ROFI dalam tubuh IPP.
7. Program kerja masa jihad 2015–2017 diperoleh melalui dokumentasi organisasi yang lebih sistematis dan lengkap dibandingkan periode sebelumnya. Dokumen ini diklasifikasikan sebagai sumber primer yang mencerminkan fase konsolidasi IPP secara struktural dan ideologis. Penelusuran terhadap sumber ini difokuskan pada pemetaan tahapan kaderisasi yang mulai dirumuskan secara lebih jelas serta upaya standarisasi pelaksanaan ROFI di tingkat wilayah dan daerah. Program kerja ini menjadi sumber penting untuk menelusuri perkembangan institusionalisasi ROFI dalam tubuh IPP.
8. Program kerja periode 2020–2024 dikategorikan sebagai sumber primer kontemporer yang lahir dalam konteks krisis pandemi Covid-19. Dokumen ini diperoleh dari arsip organisasi dan diperkuat oleh keterangan lisan pengurus pusat periode kelima. Penelusuran terhadap

sumber ini difokuskan pada perubahan metode kaderisasi, terutama pergeseran ke model daring, serta implikasinya terhadap pelaksanaan ROFI. Program kerja ini menjadi sumber penting untuk memahami adaptasi kaderisasi IPP dalam situasi darurat dan perubahan sosial yang cepat.

9. Program kerja masa jihad 2024–2026. Dokumen ini diperoleh langsung dari Pimpinan Pusat IPP dan didukung oleh wawancara dengan ketua umum serta bidang kaderisasi periode ini. Dalam konteks heuristik, penelusuran sumber ini diarahkan pada upaya revitalisasi ROFI dan penegasan kembali visi *Ar-Rasikhuna fil 'Ilmi* dalam kerangka kaderisasi pelajar Persis. Karena masih berlangsung, sumber ini diposisikan sebagai bahan awal untuk analisis perkembangan terkini sistem kaderisasi IPP.

B. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah informasi yang diperoleh dari pihak yang tidak secara langsung mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa, melainkan bersumber dari hasil interpretasi, analisis, atau laporan orang lain mengenai peristiwa tersebut. Informasi ini umumnya merupakan hasil pengumpulan dari berbagai referensi lain dan disajikan dalam bentuk ringkasan, penafsiran, penyusunan ulang, ulasan, atau komentar. Contoh umum dari sumber sekunder antara lain buku, bibliografi, tinjauan pustaka, risalah, ensiklopedia, jurnal, skripsi, maupun tesis. Sumber sekunder umumnya berisi kajian atau laporan mengenai penelitian yang dilakukan oleh pihak lain, ditulis oleh penulis yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa maupun penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan sejumlah sumber sekunder yang berfungsi untuk memperkuat analisis. Adapun beberapa sumber sekunder yang digunakan antara lain:

a. Sumber tulisan:

1. Farhan Fuadi Rahman, *Apa Itu Ikatan Pelajar Persis* (Bandung: Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis, 2013). Tulisan ini digunakan sebagai sumber sekunder untuk memahami identitas ideologis dan orientasi awal IPP sebagai organisasi pelajar Persis. Karya ini membantu menjelaskan posisi IPP dalam tradisi kaderisasi Persis serta menjadi konteks konseptual bagi lahirnya sistem kaderisasi ROFI.
2. Andi Muhammad Nurdin, *Apa Kabar Amanahku?* (Bandung: Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis, 2014). Sumber ini dimanfaatkan sebagai refleksi internal organisasi yang menggambarkan dinamika dan problem awal kaderisasi IPP. Tulisan ini penting untuk membaca ketegangan antara idealisme kaderisasi dan praktik organisasi pada fase awal perkembangan ROFI.
3. Ryan Alviana, *Bagaimana Sejarah Pendirian IPP–IPPi* (Bandung: Dokumen Internal IPP, 2022). Dokumen ini digunakan sebagai sumber sekunder naratif untuk merekonstruksi kronologi pendirian IPP dan latar organisatoris perumusan awal ROFI. Tulisan ini melengkapi sumber lisan dengan penjelasan tertulis mengenai dinamika internal pendirian organisasi.
4. Husna Hisaba Kholid, *Karakteristik Ar-Rasikhuna fil ‘Ilmi: Kajian Semantik QS. Ali Imran: 7* (Bandung: sebagai sumber sekunder untuk menafsirkan makna ideologis *Ar-Rasikhuna fil ‘Ilmi* yang menjadi dasar visi kaderisasi ROFI. Sumber ini membantu menjelaskan dimensi teologis dan normatif dari konsep kaderisasi IPP.
5. Birri Rahman, *Mendalami Makna Ar-Rasikhuna fil ‘Ilmi* (Bandung: Dokumen Internal IPP, tanpa tahun). Tulisan ini dimanfaatkan sebagai sumber sekunder yang merefleksikan proses internalisasi nilai *Ar-Rasikhuna fil ‘Ilmi* dalam

praktik kaderisasi IPP. Sumber ini memperlihatkan upaya kader IPP dalam mengontekstualisasikan visi ROFI pada fase perkembangan organisasi.

2. Kritik

Kritik sumber merupakan tahapan penilaian atau pengujian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh, dengan tujuan untuk menilai tingkat kebenaran dan keabsahannya. Pada tahap ini, peneliti meneliti kembali apakah sumber tersebut merupakan naskah asli atau hanya salinan, serta menilai kesesuaiannya dengan fakta yang ada. Proses ini bertujuan menghasilkan data dengan tingkat kredibilitas setinggi mungkin melalui seleksi ketat terhadap sumber.

Hasil dari kritik sumber diharapkan dapat menghasilkan sumber sejarah yang kredibel (credible), berdasarkan kesaksian langsung (eyewitness), benar (truth), tidak dipalsukan (unfabricated), dan dapat diandalkan (reliable). Kritik sumber sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.²⁶

A. Kritik Ekstren

Kritik ekstern merupakan tahapan penilaian yang menitikberatkan pada aspek keaslian suatu sumber sejarah. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah sumber tersebut benar-benar merupakan naskah asli atau hanya berupa salinan, apakah kondisinya masih utuh atau telah mengalami perubahan, serta apakah bentuknya sesuai dengan versi awal atau merupakan turunan. Dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap keaslian bahasa, istilah, maupun isi dokumen, sehingga dapat dipastikan bahwa sumber memiliki integritas dan benar-benar sesuai dengan apa yang ditulis pada masa awalnya

Kritik ekstern juga digunakan untuk perbandingan antara sumber yang didapat dengan sumber-sumber lainnya yang sezaman.²⁷ Di antara kritik ekstern yang penulis lakukan adalah:

²⁶ Wasino dan Endah Sri Hartatik, dalam *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*, 1 ed. (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), Hal. 13

²⁷ Madjid and Wahyudhi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (n.d.).

a. Sumber primer

1. Sumber lisan

- 1) Lamlam Pahala, M.Ag. (Mantan Ketua Umum Hima Persis ke-IV) Lamlam Pahala merupakan tokoh struktural Persis tingkat mahasiswa yang memiliki hubungan langsung dengan dinamika organisasi pelajar Persis. Identitas narasumber jelas, latar pendidikan dan jabatan dapat diverifikasi, serta wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) pada waktu dan tempat yang terdata. Dengan demikian, sumber ini memenuhi kriteria keaslian, kredibilitas, dan relevansi sebagai sumber lisan primer.
- 2) Ryan Alviana, M.Pd (Ketua Majelis Presidium / Formatur Pendirian IPP) Ryan Alviana merupakan aktor utama dan terlibat langsung dalam pendirian IPP. Statusnya sebagai formatur dan penyusun awal organisasi menjadikan kesaksiannya sangat otentik. Identitas, posisi, serta waktu dan tempat wawancara terdokumentasi dengan jelas, sehingga sumber ini sah sebagai sumber primer utama.
- 3) Andi Muhammad Nurdin (Ketua Umum IPP ke-I, 2010–2012) Andi Muhammad Nurdin merupakan Ketua Umum pertama IPP dan pelaksana awal sistem kaderisasi ROFI. Identitas, jabatan, dan periode kepemimpinannya jelas serta dapat diverifikasi. Wawancara dilakukan dengan metode daring yang tetap dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
- 4) Zamzam Aqbil Raziqin, M.H (Bidang Kaderisasi Periode I dan II) Zamzam Aqbil Raziqin memiliki otoritas teknis dalam bidang kaderisasi IPP pada periode awal. Identitas dan perannya jelas serta relevan langsung dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung di

kediaman narasumber, sehingga valid sebagai sumber primer.

- 5) Husna Hisaba Kholid, S.Hum (Ketua Umum IPP ke-II, 2012–2014) Husna Hisaba Kholid merupakan Ketua Umum IPP periode kedua yang melanjutkan estafet kepemimpinan awal. Identitas dan jabatan jelas, wawancara dilakukan secara langsung, sehingga memenuhi syarat keaslian sumber
- 6) Birri Rahman, S.Pd (Ketua Umum IPP ke-III, 2015–2017) Birri Rahman merupakan Ketua Umum IPP pada fase pengembangan organisasi. Identitas, usia, dan jabatan dapat diverifikasi, serta wawancara dilakukan secara langsung. Sumber ini sah sebagai sumber lisan primer.
- 7) Arman Nur Hakim M, S.Ag (Ketua Umum IPP ke-IV, 2017–2019) Arman Nur Hakim menjabat sebagai Ketua Umum IPP pada periode lanjutan dan memiliki pengalaman langsung dalam mengelola kaderisasi. Identitas dan konteks wawancara jelas sehingga layak sebagai sumber sejarah.
- 8) Rifqi Rifyal Rizaldi, S.Sos (Ketua Umum IPP ke-V, 2020–2024) Rifqi Rifyal Rizaldi merupakan Ketua Umum IPP pada periode mutakhir. Identitas dan perannya jelas serta relevan langsung dengan periode akhir penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung, sehingga valid sebagai sumber primer.
- 9) Ferdiansyah (Ketua Umum IPP ke-VI, 2024–2026) Ferdiansyah merupakan Ketua Umum IPP yang sedang menjabat. Identitas dan jabatan dapat diverifikasi, serta wawancara dilakukan di kantor pusat Persis, sehingga keabsahan sumber terjamin.
- 10) Fathi Yakan Alfawwaz (Ketua Bidang Kaderisasi IPP 2024–2026) Fathi Yakan Alfawwaz merupakan pejabat teknis kaderisasi periode mutakhir. Identitas dan jabatan

jelas, serta wawancara dilakukan secara langsung di kantor PP Persis.

2. Sumber tulisan

- 1) QA–QD (Qanun Asasi–Qanun Dakhili) IPP QA–QD merupakan dokumen resmi organisasi yang disahkan melalui mekanisme musyawarah IPP. Keaslian dan legalitasnya dapat diverifikasi, sehingga sah sebagai sumber tertulis primer.
- 2) Manhaj Kaderisasi IPP. Manhaj Kaderisasi merupakan pedoman resmi yang disusun oleh bidang kaderisasi dan digunakan dalam proses pembinaan anggota. Dokumen ini otentik dan relevan dengan fokus penelitian.
- 3) Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Ikatan Pelajar Persis Masa Jihad 2024–2026 merupakan dokumen resmi yang memuat arah gerakan, tujuan, program, karakter kader, dan kebijakan organisasi. GBHO menempatkan IPP sebagai organisasi kader yang berorientasi pada tajdid, penguatan intelektual, dan pembentukan akhlak Islami. Kader yang diharapkan ialah generasi *Ar-Rasikhuna fil 'Ilmi* yang berjati diri *Ibadurrahman*, berpikir kritis, serta bertanggung jawab terhadap umat, bangsa, dan negara. Dokumen ini termasuk sumber primer karena diterbitkan langsung oleh Pimpinan Pusat IPP sebagai pedoman resmi organisasi pada periode 2024–2026
- 4) Program kerja periode awal IPP (2010–2012) merupakan dokumen organisasi yang lahir pada fase embrional pembentukan IPP. Secara eksternal, dokumen ini dapat dikategorikan sebagai sumber primer karena disusun oleh aktor struktural IPP pada masa awal berdirinya organisasi. Autentisitas dokumen relatif kuat karena berasal dari arsip resmi Pimpinan Pusat IPP dan selaras dengan keterangan

lisan para pendiri serta ketua umum pertama. Namun, keterbatasan periode ini terletak pada belum adanya standarisasi administrasi organisasi, sehingga format dan sistematika program kerja masih bersifat sederhana dan belum baku.

- 5) Program kerja periode 2012–2014 disusun ketika IPP mulai memperoleh pengakuan struktural yang lebih kuat di lingkungan Persis. Secara eksternal, sumber ini dapat diverifikasi melalui kesesuaian dengan QA–QD IPP dan keterangan para pengurus periode kedua. Format dokumen menunjukkan peningkatan administrasi dibandingkan periode sebelumnya, menandakan perkembangan tata kelola organisasi.
- 6) Program kerja periode 2015–2017 lahir dalam konteks organisasi yang relatif stabil. Secara eksternal, dokumen ini memiliki reliabilitas yang lebih tinggi karena disusun dengan sistematika yang lebih rapi dan terdokumentasi dengan baik. Keabsahannya diperkuat oleh kesesuaian dengan laporan kegiatan dan kesaksian ketua umum periode ketiga.
- 7) Program kerja periode 2017–2019 dapat dinilai sebagai dokumen organisasi yang matang, baik dari segi format maupun substansi. Dokumen ini dapat diuji keabsahannya melalui kesesuaian dengan dinamika organisasi Persis secara nasional dan testimoni pengurus pusat serta wilayah.
- 8) Program kerja periode 2017–2019 dapat dinilai sebagai dokumen organisasi yang matang, baik dari segi format maupun substansi. Dokumen ini dapat diuji keabsahannya melalui kesesuaian dengan dinamika organisasi Persis secara nasional dan testimoni pengurus pusat serta wilayah.
- 9) Program kerja periode 2024–2026 masih berada dalam fase berjalan. Dokumen ini dapat dikategorikan sebagai sumber

primer kontemporer yang merefleksikan arah kebijakan terkini IPP. Keabsahannya dapat diuji melalui kesesuaian dengan dinamika organisasi dan pernyataan resmi pengurus pusat.

b. Sumber sekunder

1. Sumber tulisan

- 1) Farhan Fuadi Rahman, *Apa Itu Ikatan Pelajar Persis* (Bandung: Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis, 2013). Secara eksternal, tulisan ini merupakan dokumen internal organisasi yang ditulis oleh kader IPP dan diterbitkan oleh Pimpinan Pusat IPP. Keaslian sumber dapat dipertanggungjawabkan karena berasal dari lingkungan organisasi dan sesuai dengan konteks waktu perkembangan awal IPP. Namun, karena bersifat internal dan populer-edukatif, sumber ini tidak melalui proses penelaahan akademik.
- 2) Andi Muhammad Nurdin, *Apa Kabar Amanahku?* (Bandung: Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis, 2014). Tulisan ini ditulis oleh aktor utama sejarah IPP, yakni ketua umum pertama, dan diterbitkan sebagai tulisan reflektif organisasi. Secara eksternal, sumber ini otentik dan relevan dengan periode awal kaderisasi IPP, namun bersifat subjektif karena ditulis berdasarkan pengalaman personal penulis.
- 3) Ryan Alviana, *Bagaimana Sejarah Pendirian IPP-IPPi* (Bandung: Dokumen Internal IPP, 2022). Dokumen ini merupakan arsip internal organisasi yang ditulis oleh formatur pendirian IPP. Keabsahan sumber relatif kuat karena penulis terlibat langsung dalam peristiwa yang dikisahkan. Namun, karena tidak diterbitkan secara akademik, sumber ini tidak memiliki verifikasi eksternal formal.

- 4) Husna Hisaba Kholid, *Karakteristik Ar-Rasikhuna fil 'Ilmi: Kajian Semantik QS. Ali Imran: 7*. Tulisan ini merupakan kajian konseptual-keagamaan yang disusun oleh kader IPP dan beredar sebagai dokumen internal. Secara eksternal, sumber ini otentik dan relevan dengan visi ideologis ROFI, tetapi tidak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terindeks.
- 5) Birri Rahman, *Mendalami Makna Ar-Rasikhuna fil 'Ilmi* (Bandung: Dokumen Internal IPP, 2016). Dokumen ini merupakan tulisan reflektif kader IPP yang berfungsi sebagai pengayaan ideologis internal organisasi. Secara eksternal, keaslian sumber dapat dipastikan, namun sifatnya non-akademik dan tidak melalui proses penilaian ilmiah formal.

B. Kritik Intern

Kritik intern adalah tahapan yang berfokus pada penilaian isi sumber sejarah, dengan tujuan menilai sejauh mana informasi yang termuat relevan dengan topik penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tahap ini sangat penting, terutama ketika menggunakan sumber sekunder, karena isi biasanya sudah melalui interpretasi penulis yang bisa mengandung subjektivitas tertentu.

Pelaksanaan kritik intern dilakukan dengan cara membandingkan berbagai pandangan atau penafsiran dari sejumlah sumber lain yang membahas data serupa. Adapun prosedurnya mencakup penilaian intrinsik terhadap isi, analisis kapasitas dan otoritas penulis, verifikasi melalui teknik koraborasi, serta perbandingan (komparasi) dengan sumber-sumber lain. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang lebih objektif dan akurat dari suatu sumber sejarah.

a. Sumber primer

1. Sumber lisan

- 1) Lam Lam Pahala, M.Ag. (Mantan Ketua Umum Hima Persis ke-IV)
Sebagai tokoh Hima Persis, narasi yang disampaikan berpotensi

dipengaruhi sudut pandang struktural Persis tingkat atas. Hal ini dapat memunculkan kecenderungan normatif atau legitimatif terhadap kebijakan organisasi. Oleh karena itu, keterangannya perlu dibaca sebagai perspektif relasi IPP–Persis, bukan sebagai gambaran teknis internal kaderisasi IPP.

- 2) Ryan Alviana, M.Pd (Ketua Majelis Presidium / Formatur Pendirian IPP) Sebagai aktor pendiri, narasi yang disampaikan berpotensi mengandung bias heroik atau penekanan pada legitimasi proses pendirian IPP. Ada kemungkinan penekanan lebih pada keberhasilan dibandingkan kegagalan awal. Oleh karena itu, kesaksiannya perlu diverifikasi dengan sumber lisan lain dan dokumen organisasi.
- 3) Andi Muhammad Nurdin (Ketua Umum IPP ke-I, 2010–2012) Sebagai Ketua Umum pertama, Andi cenderung menyampaikan narasi reflektif dan kritis, namun tetap berpotensi subjektif karena terlibat langsung dalam pengambilan keputusan awal. Kesaksiannya penting untuk fase formatif, tetapi harus diuji silang dengan keterangan pengurus lain dan dokumen resmi.
- 4) Zamzam Aqbil Raziqin, M.H (Bidang Kaderisasi Periode I dan II) Sebagai perumus dan pelaksana kaderisasi, narasinya berpotensi menekankan aspek konseptual dan keberhasilan program. Keterangannya perlu dikritisi untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara konsep kaderisasi dan implementasi faktual di lapangan.
- 5) Husna Hisaba Kholid, S.Hum (Ketua Umum IPP ke-II, 2012–2014) Sebagai pemimpin transisi, kesaksiannya cenderung menyoroti proses konsolidasi organisasi. Potensi bias muncul dalam pembelaan kebijakan periode kepemimpinannya. Oleh karena itu, keterangannya perlu dibandingkan dengan narasi periode sebelum dan sesudahnya.

- 6) Birri Rahman, S.Pd (Ketua Umum IPP ke-III, 2015–2017) Narasi yang disampaikan cenderung menggambarkan fase stabilisasi dan penguatan organisasi. Potensi bias terletak pada penekanan keberhasilan program kaderisasi tanpa menyoroti kegagalan atau konflik internal.
- 7) Arman Nur Hakim M, S.Ag (Ketua Umum IPP ke-IV, 2017–2019) Sebagai bagian dari kesinambungan kepemimpinan, kesaksiannya berpotensi bersifat administratif dan normatif. Narasi perlu diuji dengan data kaderisasi faktual dan sumber tertulis organisasi.
- 8) Rifqi Rifyal Rizaldi, S.Sos (Ketua Umum IPP ke-V, 2020–2024) Sebagai pemimpin periode terkini, kesaksiannya masih berada dalam konteks aktif organisasi sehingga berpotensi normatif dan defensif. Diperlukan jarak kritis dalam menafsirkan narasinya.
- 9) Ferdiansyah (Ketua Umum IPP ke-VI, 2024–2026) Karena masih aktif menjabat, narasinya cenderung visioner dan programatik. Kesaksian ini lebih tepat dibaca sebagai pandangan kontemporer dan proyeksi masa depan kaderisasi, bukan evaluasi historis sepenuhnya.
- 10) Fathi Yakan Alfawwaz (Ketua Bidang Kaderisasi IPP 2024–2026) Sebagai pelaksana kaderisasi aktif, narasinya cenderung normatif dan operasional. Informasi yang disampaikan perlu dikaitkan dengan hasil konkret dan pengalaman kader di lapangan.

2. Sumber tulisan

- 1) QA–QD (Qanun Asasi–Qanun Dakhili) IPP Isi dokumen bersifat normatif dan preskriptif, sehingga tidak secara langsung mencerminkan praktik organisasi. Dokumen ini perlu diuji dengan sumber lisan dan fakta empiris.
- 2) Manhaj Kaderisasi IPP, Dokumen ini menggambarkan standar ideal kaderisasi, bukan realitas pelaksanaan. Oleh karena itu, perlu dibaca secara kritis dan dikomparasikan dengan pengalaman para pelaku organisasi.

- 3) Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Ikatan Pelajar Persis Masa Jihad 2024–2026 merupakan dokumen resmi yang memuat arah gerakan, tujuan, program, karakter kader, dan kebijakan organisasi. GBHO menempatkan IPP sebagai organisasi kader yang berorientasi pada tajdid, penguatan intelektual, dan pembentukan akhlak Islami. Kader yang diharapkan ialah generasi *Ar-Rasikhuna fil 'Ilmi* yang berjati diri *Ibadurrahman*, berpikir kritis, serta bertanggung jawab terhadap umat, bangsa, dan negara. Dokumen ini termasuk sumber primer karena diterbitkan langsung oleh Pimpinan Pusat IPP sebagai pedoman resmi organisasi pada periode 2024–2026
- 4) Program kerja periode 2010–2012 menunjukkan fokus utama pada konsolidasi organisasi dan pencarian bentuk kaderisasi pelajar Persis. ROFI pada fase ini masih berada pada tahap konseptual awal, belum terumuskan secara matang sebagai sistem kaderisasi terpadu. Hal ini tercermin dari program kerja yang lebih menekankan pembentukan struktur dan legitimasi organisasi dibandingkan pendalaman kurikulum kaderisasi.
- 5) Program kerja 2012-2014 periode ini mulai menampilkan upaya konkret penguatan kaderisasi melalui ROFI, meskipun masih ditemukan ketegangan antara visi normatif *Ar-Rasikhuna fil 'Ilmi* dan praktik kaderisasi di lapangan. Beberapa program bersifat simbolik dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan penguatan keilmuan kader, sebagaimana diakui oleh pengurus periode ini dalam refleksi internal organisasi.
- 6) Program kerja 2015-2017 periode ini menunjukkan fase konsolidasi ROFI sebagai sistem kaderisasi IPP. Program kerja mulai memuat tahapan kaderisasi yang lebih jelas, meskipun implementasinya belum merata di seluruh wilayah. Kritik internal muncul terkait disparitas kualitas pelaksanaan ROFI antar daerah, yang

menunjukkan tantangan struktural dalam standardisasi kaderisasi pelajar Persis.

- 7) Program kerja 2017-2019 periode ini menandai upaya penguatan ideologis ROFI melalui penyesuaian materi kaderisasi dengan tantangan pelajar di era digital. Namun demikian, muncul kritik internal terkait kecenderungan administratif yang mulai menguat, sehingga kaderisasi berpotensi terjebak pada rutinitas program tanpa pendalaman ideologis yang memadai.
- 8) Program kerja 2020-2024 periode ini menghadirkan tantangan besar bagi efektivitas ROFI. Kaderisasi daring dinilai mampu menjaga kontinuitas organisasi, tetapi pada saat yang sama memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kualitas interaksi ideologis dan pembinaan karakter. Kritik internal menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap metode kaderisasi daring agar tidak mereduksi makna *Ar-Rasikhuna fil 'Ilmi*.
- 9) Program kerja 2024-2026 periode ini menunjukkan upaya revitalisasi ROFI dengan menekankan penguatan ideologis, kualitas kaderisasi, dan integrasi teknologi. Namun, karena masih berlangsung, efektivitas implementasinya belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. Kritik internal bersifat prospektif, terutama terkait konsistensi pelaksanaan dan kesinambungan nilai *Ar-Rasikhuna fil 'Ilmi* dalam praktik kaderisasi.

b. Sumber sekunder

1. Sumber tulisan

- 1) Farhan Fuadi Rahman, *Apa Itu Ikatan Pelajar Persis* (Bandung: Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis, 2013). Secara internal, isi tulisan cenderung normatif dan afirmatif terhadap IPP sebagai organisasi. Narasi yang dibangun lebih bersifat pengenalan identitas dan legitimasi ideologis, sehingga kurang menampilkan kritik atau problem internal organisasi. Oleh karena itu, sumber ini digunakan

untuk konteks konseptual, bukan sebagai satu-satunya rujukan faktual.

- 2) Andi Muhammad Nurdin, *Apa Kabar Amanahku?* (Bandung: Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis, 2014). Isi tulisan mengandung kritik internal yang kuat terhadap praktik kaderisasi dan aktivisme IPP pada masa awal. Subjektivitas penulis tampak dalam penekanan pada aspek moral dan ideologis, sehingga diperlukan perbandingan dengan sumber lain untuk menghindari bias personal dalam interpretasi sejarah.
- 3) Ryan Alviana, *Bagaimana Sejarah Pendirian IPP–IPPi* (Bandung: Dokumen Internal IPP, 2022). Secara internal, narasi sejarah yang disajikan cenderung sistematis dan kronologis, tetapi masih menampilkan sudut pandang elite pendiri. Beberapa dinamika konflik dan resistensi internal tidak diuraikan secara mendalam, sehingga sumber ini perlu dilengkapi dengan wawancara dan dokumen lain.
- 4) Husna Hisaba Kholid, *Karakteristik Ar-Rasikhuna fil ‘Ilmi: Kajian Semantik QS. Ali Imran: 7*. Secara internal, analisis bersifat normatif-teologis dan menekankan idealitas konsep *Ar-Rasikhuna fil ‘Ilmi*. Keterbatasannya terletak pada minimnya keterkaitan langsung dengan praktik kaderisasi IPP di lapangan, sehingga sumber ini lebih tepat digunakan sebagai landasan ideologis daripada bukti empiris.
- 5) Birri Rahman, *Mendalami Makna Ar-Rasikhuna fil ‘Ilmi* (Bandung: Dokumen Internal IPP, 2016). Isi tulisan menampilkan interpretasi ideologis yang kuat dan cenderung apologetik terhadap konsep ROFI. Narasi lebih menekankan afirmasi nilai daripada evaluasi kritis terhadap pelaksanaan kaderisasi. Oleh karena itu, sumber ini digunakan secara selektif untuk memahami persepsi internal kader terhadap makna ROFI.

3. Interpretasi

Tahap berikut dalam proses penelitian ini adalah menyusun dan merangkai data yang telah melalui proses seleksi dan verifikasi secara sistematis ke dalam suatu bangunan narasi yang utuh, harmonis, dan koheren. Penyusunan ini tidak berhenti pada pengurutan fakta secara kronologis, melainkan menuntut kemampuan analitis untuk menempatkan setiap fakta dalam jejaring struktur sosial yang melingkupinya. Fakta sejarah yang berdiri sendiri belum memiliki makna ilmiah sebelum diinterpretasikan dalam kerangka teoritis yang mampu menjelaskan hubungan kausal, fungsi, serta signifikansinya dalam dinamika sosial. Dengan demikian, historiografi merupakan hasil konstruksi intelektual yang lahir dari sintesis antara data empiris dan perangkat analisis teoritis.

Untuk menganalisis sistem kaderisasi ROFI (Arrasikhuna fil Ilmi) dalam tubuh Ikatan Pelajar Persatuan Islam (IPP) di Jawa Barat periode 2010–2024, penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh sosiolog Amerika, Talcott Parsons. Dalam karyanya *The Social System* (1951), Parsons menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem tindakan yang tersusun atas struktur-struktur yang saling berkaitan dan berfungsi mempertahankan keseimbangan sosial.²⁸ Perspektif ini menekankan bahwa setiap institusi sosial bekerja untuk menopang stabilitas dan keteraturan sistem secara keseluruhan.

Fungsionalisme struktural memandang bahwa setiap struktur sosial memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap keberlangsungan sistem. Dalam konteks ini, IPP dipahami bukan sekadar sebagai wadah administratif, melainkan sebagai sistem yang memiliki perangkat norma, peran, dan institusi kaderisasi yang bekerja secara simultan. ROFI, sebagai sistem kaderisasi, diposisikan sebagai mekanisme institusional yang berfungsi menanamkan nilai, membentuk orientasi tindakan, serta memastikan reproduksi norma organisasi secara berkelanjutan.

Mengacu pada skema AGIL yang dirumuskan Parsons dalam *The Social System* dan diperjelas kembali dalam *Societies: Evolutionary and Comparative*

²⁸ Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe, IL: The Free Press, 1951), 5–29.

Perspectives (1966),²⁹ sistem sosial harus memenuhi empat prasyarat fungsional: Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latency (L). Dalam kerangka tersebut, sistem ROFI dapat dipahami sebagai berikut:

Pertama, pada dimensi Adaptation, kaderisasi menjadi instrumen yang memungkinkan organisasi menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, perubahan generasi, serta tantangan globalisasi dan digitalisasi sepanjang 2010–2024.

Kedua, pada dimensi Goal Attainment, ROFI berfungsi sebagai sarana pencapaian tujuan organisasi, yakni membentuk generasi Arrasikhuna fil Ilmi yang memiliki kedalaman intelektual dan komitmen ideologis terhadap nilai-nilai Persatuan Islam.

Ketiga, pada dimensi Integration, kaderisasi menciptakan kohesi sosial melalui internalisasi norma, disiplin, dan solidaritas kolektif, sehingga tercipta keselarasan antara individu dan struktur organisasi.

Keempat, pada dimensi Latency (Pattern Maintenance), ROFI berperan dalam memelihara dan mentransmisikan pola nilai serta orientasi ideologis organisasi kepada generasi berikutnya, sehingga kesinambungan identitas kolektif tetap terjaga.

Dalam perspektif ini, hierarki antara senior, junior, dan alumni tidak dipahami sebagai relasi kuasa personal semata, melainkan sebagai diferensiasi peran yang bersifat fungsional. Parsons menegaskan bahwa diferensiasi peran merupakan mekanisme penting dalam menjaga keteraturan dan efektivitas sistem sosial.³⁰ Kepatuhan kader terhadap struktur organisasi bukanlah sekadar hasil otoritas formal, tetapi lahir dari internalisasi norma yang telah dilembagakan melalui mekanisme kaderisasi.

²⁹ Talcott Parsons, *Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1966), 17–36

³⁰ Talcott Parsons, *Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1966), 25–45.

Dengan demikian, sistem ROFI dapat dipahami sebagai instrumen struktural yang memastikan stabilitas, integrasi, serta kesinambungan organisasi. Ia bekerja tidak hanya pada tataran manifest yakni pembentukan kompetensi keislaman tetapi juga pada tataran laten, yaitu reproduksi nilai dan pemeliharaan solidaritas kolektif. Melalui pendekatan fungsionalisme struktural, kaderisasi IPP tampil sebagai fondasi utama dalam menjaga keseimbangan sistem organisasi di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi adalah tahap penting dalam penelitian sejarah yang menekankan pada cara suatu peristiwa atau topik ditulis, ditafsirkan, dan dipahami oleh sejarawan dari berbagai perspektif dan periode waktu. Historiografi tidak sekadar menyalin peristiwa, tetapi juga merupakan refleksi kritis terhadap proses penulisan sejarah itu sendiri. Tahap ini mencakup analisis perspektif penulis, teori atau pendekatan sejarah yang digunakan, serta metode penelitian yang diterapkan dalam menghasilkan karya sejarah.³¹ Dalam penelitian ini, historiografi digunakan untuk menelaah kajian terkait Organisasi Ikatan Pelajar Persis dan peran kaderisasi organisasi di Jawa Barat. Organisasi Ikatan Pelajar Persis dipandang sebagai salah satu aktor penting dalam menjaga dan mempertahankan kestabilan organisasi, sehingga penelitian ini menyoroti kontribusinya terhadap perkembangan dan perubahan siklus berputarnya roda kaderisasi.

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat konteks, urgensi, dan metodologi penelitian historis: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Penelitian Terdahulu serta Metode Penelitian (Heuristik, Kritik, Interpretasi, Historiografi).

Bab II: Sejarah ikatan pelajar persis di jawa barat

³¹ Wasino dan Endah Sri Hartatik, dalam *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*, 1 ed. (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), Hal. 13

Bab ini membahas sejarah Ikatan Pelajar Persis di Jawa Barat dengan menelusuri Persatuan Islam sebagai basis gerakan kaderisasi, genealogi organisasi pelajar Persis, proses pendirian IPP, serta perkembangan struktur dan kelembagaannya. Kehadiran IPP merupakan hasil dari perjalanan panjang pembinaan pelajar Persis yang sebelumnya berlangsung melalui pesantren, Rijalul Ghad, Ummahatul Ghad, dan berbagai forum komunikasi pelajar. Dinamika tersebut kemudian melahirkan kebutuhan akan organisasi pelajar yang memiliki cakupan lebih luas, sistem kepemimpinan yang teratur, dan arah kaderisasi yang berkesinambungan. Sejak didirikan pada 2010, IPP berkembang melalui proses konsolidasi, perluasan pimpinan daerah, penguatan sistem organisasi, dan penyesuaian terhadap perubahan sosial pelajar, hingga menjadi bagian penting dalam proses regenerasi Persatuan Islam di Jawa Barat.

Bab III: Peran ikatan pelajar persis dalam kaderisasi pelajar persis di jawa barat

Bab ini membahas peran Ikatan Pelajar Persis dalam kaderisasi pelajar Persis di Jawa Barat pada periode 2010–2024. Peran tersebut diwujudkan melalui pembentukan ruang pembinaan yang menghubungkan pelajar dari berbagai pesantren dan sekolah Persis, penyelenggaraan kaderisasi ROFI secara berjenjang, pendampingan terhadap pimpinan daerah, serta penyiapan kader untuk melanjutkan kepemimpinan organisasi. Melalui proses tersebut, IPP tidak hanya berfungsi sebagai wadah aktivitas pelajar, tetapi juga sebagai instrumen regenerasi yang menanamkan nilai keislaman, kepersisan, keilmuan, kepemimpinan, dan komitmen dakwah. Perkembangan kelembagaan dan sistem kaderisasi yang semakin terstruktur menunjukkan upaya IPP dalam menjaga kesinambungan kader pelajar serta menyiapkan sumber daya manusia yang dapat berkhidmat di lingkungan Persatuan Islam.

Bab IV : Penutup

Bab IV merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan atas seluruh pembahasan mengenai sejarah dan peran Ikatan Pelajar Persis dalam kaderisasi pelajar Persis di Jawa Barat pada 2010–2024. Kesimpulan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dengan menegaskan proses pembentukan dan perkembangan kelembagaan IPP, perubahan sistem kaderisasi dari pola personal menuju ROFI yang lebih terstruktur, serta pengaruh otonomisasi terhadap penguatan kedudukan organisasi. Bab ini juga memuat saran yang ditujukan bagi IPP, Persatuan Islam, dan penelitian selanjutnya sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan kaderisasi, pengelolaan arsip organisasi, serta penguatan pembinaan pelajar Persis secara berkelanjutan.

